



KOMISI NASIONAL DISABILITAS REPUBLIK INDONESIA

Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar, Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22, Cawang, Jakarta Timur, 13630
Surel: sekretariat.knd@gmail.com

SAMBUTAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS RI JOB FAIR, SOFT LAUNCHING JATIM BISSA, DAN PAMERAN WIRAUSAHA KADIN TAHUN 2024 – DISNAKER PROV. JAWA TIMUR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang kami hormati,

Bapak Adhy Karyono, Pj Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si. sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur; Mr. Takeyama Kenichi, Konsulat Jendral Jepang di Surabaya; Mr. Lee Kyeong Yun, Asisten Konsuler Kedutaan Besar Republik Korea Selatan di Surabaya; Ibu Siti Kustiati, SE., M.Si, Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kementerian Ketenagakerjaan RI; Bapak Muchammad Yusuf, ST., M.Si, Kepala Pusat Pasar Kerja; Bp Ida Bagus Nugroho, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur; Bapak Benny Sampirwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim, sekaligus sbg Wakil Ketua I Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Jawa Timur; Bp. Sigit Priyanto, ST., MM., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur; Bp Busrul Iman, Direktur Bank Jatim; Bp. Hadi Purnomo, Kepala Kantor Wilayah BPJamsostek Jawa Timur; Bp Eddy Widjanarko, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur; Bp Adek Dwi Putranto, Ketua Umum DPP Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur; Prof. Tri Arief Sardjono, ST., MT, Direktur Telkom University; Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh Kab/Kota di Prov Jawa Timur; Perwakilan pimpinan Perusahaan yang berpartisipasi dalam rekrutmen tenaga kerja termasuk penyandang disabilitas ;Perwakilan organisasi penyandang disabilitas di Jawa Timur; serta hadirin lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor kunci dan strategis dalam Pembangunan nasional. Keberhasilan capaian angka partisipasi penduduk Angkatan kerja di sektor ketenagakerjaan akan berkontribusi dalam Pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, kualitas kesehatan, dan situasi keamanan.

Negara telah memastikan menjamin pemenuhan hak seluruh warga negara termasuk Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan dasar kesetaraan, keadilan, tanpa diskriminasi. Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan tidak boleh terabaikan, sebagaimana prinsip "no one left behind" dalam TPB 2030.

Komitmen ini tertuang jelas dalam UU No. 19/2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP 60/2020 tentang ULD Ketenagakerjaan, PP 70/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, serta Permenaker 21/2020 tentang Pedoman ULD Ketenagakerjaan. Sebagai bagian dari

pemenuhan berbasis hak, PerPres 53/2021 menyatakan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari 4 kelompok sasaran yang harus dipenuhi haknya.

Hadirin sekalian yang kami hormati,
Penyediaan lapangan kerja yang inklusif sangat penting dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan bagi penyandang disabilitas. Pekerjaan yang layak menjadi kunci serta memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada perekonomian sekaligus memperoleh penghasilan yang mendukung mereka. Akses pekerjaan yang inklusif memungkinkan penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan global (International Labour Organization, 2015).

Pemenuhan hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sektor swasta terus membuka ruang dan kesempatan akses serta layanan kerja inklusi disabilitas. Meskipun demikian, harus diakui masih terdapat kesenjangan yang tinggi dalam akses informasi, jenis pekerjaan, penempatan kerja di Perusahaan public dan swasta, aksesibilitas tempat kerja, serta karir bagi Penyandang Disabilitas. Beberapa data nasional menunjukkan Angka kemiskinan penyandang disabilitas lebih tinggi (13,81%) dari angka kemiskinan nasional (9,36%), Kepemilikan rekening penyandang disabilitas lebih rendah (23,65%) dari bukan penyandang disabilitas (41,02%), Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) penyandang disabilitas lebih rendah (44%) dari partisipasi Nasional (69%).

Accenture mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria utama inklusi disabilitas memiliki pendapatan 1,6 kali lebih besar, laba bersih 2,6 kali lebih besar, dan laba dua kali lipat. Para “pejuang disabilitas” ini juga memiliki kemungkinan 25% lebih besar untuk mengungguli rekan-rekan mereka dalam hal produktivitas, yang diukur berdasarkan pendapatan per karyawan, dan mereka menerima lebih banyak ulasan positif dibandingkan dengan rekan-rekan industri lainnya. (Forbes, 2024)

Jawa Timur sebagai provinsi kedua jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia, tahun 2022, telah tercatat sebanyak 866 pekerja disabilitas yang diserap oleh 60 perusahaan di Jawa Timur. Angka ini menunjukkan masih sekitar 4 % penempatan kerja disabilitas dibanding total angkatan kerja dan Perusahaan dengan penempatan kerja disabilitas masih sekitar 0,2 %. Adanya ULD Ketenagakerjaan Disnaker Prov Jatim dan Inclusive Job Center BPJS Ketenagakerjaan Jatim diharapkan menjadi lokomotif akselerasi akses dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di seluruh Kab/Kota di Jawa Timur.

Hadirin yang kami hormati,

Kerjasama dan sinergi lintas sektor adalah kunci keberhasilan akselerasi pemenuhan hak pekerjaan yang inklusif bagi kelompok rentan termasuk Penyandang Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyampaikan apresiasi atas komitmen jajaran Pemprov Jatim dalam job fair dengan tema "MERDEKA BERKARIR, Mendukung Investasi di Jawa Timur yang Inklusif Ramah Tenaga Kerja".

Sebagai penutup, mari bersama melakukan langkah kongkrit memberi kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas di Perusahaan public dan swasta yang non-diskriminasi, berbasis “ability”, inovasi teknologi sebagai enabler, dan kesempatan berkarir demi kemajuan investasi yang inklusif ramah tenaga kerja.

Wujudkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbaik, inklusif, dan inovatif di Indonesia !

Surabaya, 24 September 2024
Eka Prastama widiyanta, ST – Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI